



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NURUL LAILI HASANAH**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**
3. NHK : **837252**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.225.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000		
2. Tanah Seluas 321 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	340.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU MINI BUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
3. LAINNYA, NISSAN LIGHT TRUCK Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
4. LAINNYA, NISSAN TRAILER Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	50.500.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	9.550.172
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.625.050.172



III. HUTANG

Rp.

513.115.214

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.111.934.958

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.